



Gedung SMKN Bali Mandara Telan Anggaran Rp 54 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Beberapa unit gedung berlantai tiga berdiri megah di sebelah selatan gedung SMAN Bali Mandara. Gedung-gedung tersebut ternyata tidak lain adalah gedung yang akan diperuntukkan untuk sarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bali Mandara yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Setelah dua tahun masa pembangunan, gedung yang konon menelan anggaran Rp 54 miliar, siap digunakan untuk proses pembelajaran siswa SMK angkatan pertama.

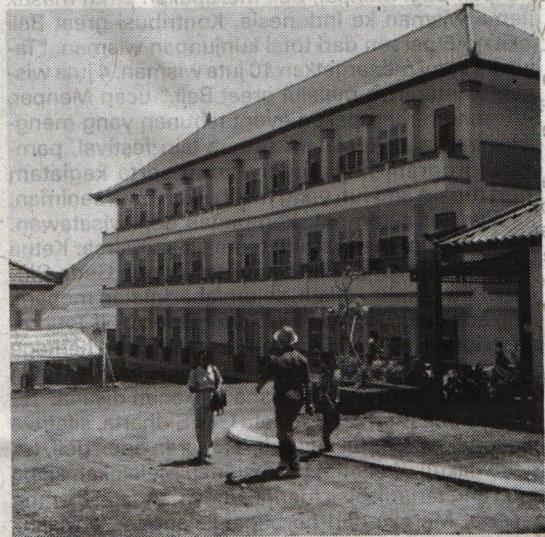
"Untuk fasilitas gedung saat ini sudah rampung semua, kalau tidak salah anggarannya ditahun lalu Rp 25 miliar dan tahun ini Rp 29 miliar. Sedangkan nanti untuk fasilitas pembelajaran akan dilengkapi secara bertahap," ujar Nyoman Dart, MPd, selaku Kepala SMAN Bali Mandara, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan dari pembangunan gedung SMKN Bali Mandara, tidak hanya diperuntukkan untuk ruang belajar saja. Tetapi juga beberapa ruangan yang sangat penting, seperti ruang perkantoran, ruang guru, ruang BK, ruang OSIS, ruang praktik dan juga asrama untuk siswa.

Di tahun pertama dibukanya SMKN Bali Mandara, diisi oleh 98 orang siswa, yang penerimaannya melalui berbagai tes, yang tidak jauh beda dengan penerimaan siswa di SMAN Bali Mandara. Seperti seleksi paper based, home visit dan juga boot camp. "Yang diutamakan disini, sebagai kriteria pertama yang harus dipenuhi adalah siswa tersebut adalah siswa dari keluarga yang kurang mampu. Sama seperti tujuan pembangunan SMAN Bali Mandara, yang dibuka untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak," imbuhnya.

Sehingga Dart pun mengungkapkan seperti pesan Gubernur Bali yang selalu terucap di depan siswa SMA Bali Mandara, kedepannya program Pemprov Bali dalam pengentasan kemiskinan dapat terwujud, dan mereka setelah tamat pun diharapkan mampu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga mereka masing-masing.

Dari 98 orang siswa SMKN Bali Mandara, akan dibagi di tiga program keahlian yang dibuka. Diantaranya 36 orang di program keahlian Tekni Komputer Jaringan (TKJ), 35 orang di program keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB) dan 27 orang sisanya di



GEDUNG lantai 3 SMKN Bali Mandara yang siap menampung dan mendidik 98 orang siswa kurang mampu untuk mendapat pendidikan yang lebih layak.

Teknik Kendaraan Ringan (TKR).

Sementara pemilihan program keahlian yang dipilih oleh SMKN Bali Mandara, merupakan program yang telah melalui proses pengkajian di bidang peluang kerja yang ada sekarang ini. Pihaknya pun tidak menampik jika tahun depan ada jurusan baru yang akan dibuka, sesuai dengan perkembangan dan pasar kerja yang berlaku saat itu.

"Program keahliannya sudah sesuai kajian, yang mana yang memiliki peluang kerja lebih besar. Dengan pembekalan keahlian ini diharapkan mereka nantinya siap kerja, dan mendapatkan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga," tegasnya.

Seperti halnya SMAN Bali Mandara, siswa SMKN Bali Mandara juga berkesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, apabila ada donator dan kampus yang bekerjasama dengan sekolah. Sekolah mengaku tetap akan memfasilitasi hal tersebut dan mengajukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi bergengsi yang ada di Indonesia. **k23**

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 4



Hutan Dikontrakkan untuk Kebun^y

NEGARA, NusaBali

Pos Polisi Hutan (Polhut) dibangun di depan pintu masuk ke kawasan Alas Sombang, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana. Namun pos yang dibangun sekitar tahun 1980 itu kini dalam keadaan rusak. Menurut warga, Pos Polhut itu jarang difungsikan sehingga kesannya jadi pajangan.

"Pos Polhut tidak pernah dimanfaatkan. Awalnya kita senanga karena pemerintah bangun Pos Polhut di sana. Nyatanya percuma, karena tidak ada yang menepati," ungkap warga sekitar. Pantauan di lapangan, sejumlah pohon di hutan negara ini telah diberangus, hanya tersisa batang kayu yang dibakar. Lahan yang sudah digunduli itu disulap menjadi kebun, ditanami jeruk dan pisang. Ketika masuk semakin ke utara, hutan sudah tampak menyerupai kebun pisang.

Lahan-lahan ini juga dipagari, dan terlihat berdiri gubuk.



ALAS Sombang di Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, beralihfungsi jadi kebun pisang. • NUSABALI/IB DIWANGKARA

Beberapa lubang galian di lahan hutan yang baru digunduli kemungkinan untuk ditanami pisang. Seorang nenek yang sempat ditemui saat mencari kayu bakar di tengah hutan negara itu, mengaku, kawasan hutan telah dikavling-kavling untuk dikontrakkan sebagai kebun. Menurutnya, pengkavlingan ini

dianggap legal. Nenek ini juga mengaku ikut mengontrak kebun di dalam hutan, hanya saja tak tahu biaya sewanya. Dikatakan, untuk kontraknya beragam. "Yen tiang nak kurenanne ngontrak. Ngontrak te 20 are (Suami saya yang ngontrak. Kontrak hanya 20 are)," ujarnya, sembari berlalu membawa kayu bakar. **od**

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 7



Kejati Usut Dugaan Korupsi Perdin DPRD Klungkung

★ Sudah Periksa Ketua DPRD Klungkung

DENPASAR, NusaBali

Diam-diam, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sedang membidik kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Klungkung pada 2015 lalu. Bahkan, penyidik Kejati sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru dan beberapa anggotanya.

Informasi yang dihimpun, kasus ini merupakan tindak lanjut terkait adanya dugaan korupsi dalam perjalanan dinas di DPRD Klungkung beberapa bulan lalu. Penyidik yang melakukan Pulbaket dan Puldata melanjutkan pemeriksaan Ketua DPRD Klungkung, wakil dan anggotanya pada, Selasa (18/8) lalu.

"Kemarin lusa ada anggota dewan Klungkung yang diperiksa terkait perjalanan dinas," jelas sumber.

Sumber lainnya malah menyebutkan ada sekitar 10 orang yang diperiksa. Di antaranya, Ketua DPRD Klungkung, wakil ketua serta beberapa anggota. Bahkan pemeriksaan masih dilanjutkan hingga, Kamis (20/8) kemarin. "Tadi ada lagi yang diperiksa. Tapi tidak tahu anggota dewan atau bukan," jelas sumber.

Meski beberapa penyidik membenarkan pemeriksaan ini, namun Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan belum bisa menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan ini. Bahkan Ashari berkilah hanya mendengar saja ada pemeriksaan tersebut. "Saya baru dengar saja ada pemeriksaan," jelasnya.

Namun salah satu jaksa penyidik, Wayan Suardi membenarkan pemeriksaan ini. "Ya memang ada

diperiksa tapi tidak sampai 10 orang," ungkap Suardi.

Sementara Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru yang coba dikonfirmasi kemarin belum bersedia memberi penjelasan. "Maaf saya masih berada di Nusa Penida," ujarnya singkat. Dari informasi memang Ketua DPRD I Wayan Baru sedang lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Nusa Penida bersama Komisi B DPRD Klungkung. **rez, k17**

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 5



Satpol PP Verifikasi 57 Galian Bodong

AMLAPURA, NusaBali

Jajaran Satpol PP Karangasem yang mengerahkan anggotakan 105 orang, memverifikasi 57 galian C bodong. Tujuannya, mendata kepemilikan dan lokasi galian itu, sehingga ke depan lebih memudahkan melakukan penutupan. Sesuai dengan komitmen Sekkab Karangasem I Gede Adnya Muliadi yang sempat diikrarkan sebelumnya saat rapat pembahasan R-APBD 2016 di DPRD, secara bertahap menutup galian C ilegal, terutama di lokasi bukan kawasan.

Atas dasar itulah, Satpol PP tengah mendata kepemilikan galian ilegal, beserta lokasinya, kepemilikan dan mendata persoalan lainnya. Iwan Suparta Kasat Pol PP Karangasem menegaskan hal itu di sela-sela menurunkan baliho mantan Bupati/Wakil Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dan I Made Suke-rana di Amlapura, Kamis (20/8).

Apalagi sebelumnya telah menjadi temuan BPK di Karangasem tercatat 57 galian bodong. Secara tidak langsung pajak dipungut berasal dari galian ilegal.

"Sekarang ini masih tahap pendataan galian C ilegal, nantinya penutupannya setelah Pilkada Ka-

rangasem, agar situasi tetap kondusif," jelas Iwan Suparta.

Iwan mengakui, banyak galian C bodong di luar kawasan galian C. Aktifitasnya tak terkontrol, terutama kedalaman menggali. Sepanjang ada lahan pasir berkualitas, terus melakukan penggalian. Padahal banyak nyawa melayang jadi korban.

Temuan BPK di tahun 2014, adanya 57 galian bodong, dengan rekomendasi penertibannya ditindaklanjuti. "Sementara penutupan galian C sebelumnya secara bertahap, itu kami lakukan, bagi galian yang benar-benar mengganggu lingkungan, terutama di dekat hutan lindung. Ada juga galian, izinnnya tidak diperpanjang, karena berbagai alasan, otomatis kegiatannya tutup. Nantilah, penutupannya akan lebih banyak terjadi, setelah tuntas melakukan verifikasi," kata Iwan.

Sekcab Adnya Muliadi yang menginstruksikan melakukan penutupan galian C. "Galian C tanpa izin terutama di luar kawasan memang akan kami tutup," kata Adnya Muliadi.

Anggota DPRD I Kadek Sujanayasa mendukung penutupan

galian C di daerah yang bukan kawasan. "Galian C lebih banyak merugikan lingkungan, resapan air jadi berkurang. Saat hujan, air langsung terbuang tanpa ada resapan, karena lokasi telah tergalii," katanya.

Ketua Komisi I DPRD I Komang Sudanta juga sependapat, menertibkan galian C tanpa izin. Penertiban itu, yang jadi prioritas di luar kawasan. "Bagi masyarakat melakukan aktivitas galian di wilayah galian, walau tanpa izin, bisa diupayakan izinnnya agar bisa keluar, asalkan terlebih dahulu menghimpun diri," jelasnya.

Untuk di Karangasem, 57 galian C ilegal, 15 galian C berizin.

Galian C di Karangasem di tiga kecamatan cukup besar, yakni: Kecamatan Selat (517,6 hektare), Kecamatan Bebandem (1.039,5 hektare), dan Kecamatan Rendang (390,8 hektare). Untuk penambahan: Kecamatan Selat (42 kelompok), Kecamatan Rendang (7 kelompok) dan Kecamatan Bebandem (14 kelompok). Kecamatan Selat termasuk bukan kawasan galian C, yang masuk kawasan di Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Kubu. **k16**

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 8